



Analisis Manajemen Logistik Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun 2023

Adewiah Sari^{1*}, Nani Yuniar², Renni Meilahsari³

^{1,2,3}Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: adewiahsari@gmail.com¹, naniyuniar0509@gmail.com², renni.meliahsari@gmail.com³

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

*Korespondensi penulis: adewiahsari@gmail.com

Abstract. *Good logistics management of medicines is one of the factors so that medicines can be managed well. The pharmacy unit of the Kolaka District Health Service has problems with inadequate storage or storage of medicines and delays in the arrival of medicines. The aim of this research is to determine the Analysis of Drug Logistics Management at the Kolaka District Health Service. The research uses qualitative methods through in-depth interviews, observations and observation guides. The results of the research show that at the drug planning stage using the consumption method, drug procurement using an e-catalog system, drug storage is still not good because the warehouse is not large enough for drug storage. Suggestions for the Kolaka District Health Service.*

Keywords: *Drug logistics Management, Public Health Office, Drug.*

Abstrak. Pengelolaan logistik obat yang baik merupakan salah satu faktor agar obat dapat dikelola dengan baik. Unit farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Mempunyai permasalahan penyimpanan atau gudang obat yang belum luas dan keterlambatan datangnya obat. Tujuan penelitian ini adalah ini untuk mengetahui Analisis Manajemen Logistic Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan panduan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan obat menggunakan metode konsumsi, pengadaan obat menggunakan system e-catalog, penyimpanan obat yang masih kurang baik dikarenakan gedung yang kurang luas untuk penyimpanan obat. Saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Kata Kunci: Manajemen Logistik Obat, Dinas Kesehatan, Obat.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang kesehatan memiliki tujuan fundamental untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu dalam menjalani hidup yang sehat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Menurut Kemenkes RI (2010), program pembangunan kesehatan nasional mencakup lima aspek pelayanan kesehatan dasar, yaitu Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), serta Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengobatan. Dalam konteks ini, pengelolaan obat yang efektif menjadi krusial, karena obat-obatan merupakan salah satu komponen penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perencanaan yang baik diperlukan agar persediaan obat sesuai dengan kebutuhan, sehingga semua fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, dapat berfungsi secara optimal dalam melayani masyarakat.

Pengelolaan obat di Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN memberikan arahan dan pedoman bagi semua penyelenggara kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satu subsistem dalam SKN adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, yang bertujuan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu dari produk-produk tersebut (Tumangger et al., 2021). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan obat dapat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat mengakses obat yang berkualitas.

Dalam prakteknya, pengelolaan sediaan farmasi tidak hanya berfokus pada ketersediaan, tetapi juga pada pemerataan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Pengelolaan yang efektif dalam instalasi farmasi rumah sakit dan puskesmas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga, terlepas dari kondisi geografis atau sosial, dapat mengakses obat yang dibutuhkan (Siska & Jepisah, 2022). Manajemen pengelolaan obat mencakup serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan obat yang perlu dilakukan secara optimal agar tercapai ketepatan jumlah dan jenis obat yang disediakan.

Permasalahan dalam manajemen logistik obat sering kali muncul dari berbagai faktor, termasuk perencanaan yang tidak akurat, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidakcocokan antara kebutuhan dan pasokan obat. Kondisi wilayah dan pola penyakit yang bervariasi di setiap daerah mempengaruhi kebutuhan obat yang berbeda-beda, sehingga puskesmas dan Dinas Kesehatan harus mampu merencanakan kebutuhan obat dengan tepat (Sardjoko et al., 2018). Keterbatasan tenaga apoteker atau farmasi di puskesmas juga dapat menghambat proses perencanaan dan pengelolaan obat. Data menunjukkan bahwa akses terhadap obat esensial di Indonesia masih rendah, dengan beberapa provinsi tidak memenuhi target nasional ketersediaan obat, dan ini menjadi isu yang sering diangkat dalam konteks Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Wasir et al., 2023).

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka bertanggung jawab atas pengelolaan obat di 14 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan. Saat ini, metode yang digunakan dalam perencanaan obat adalah berdasarkan data konsumsi obat dari bulan sebelumnya dan pola penyakit yang terjadi, yang dilaporkan melalui Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Pengadaan obat dilakukan dengan dana APBD dan DOU melalui prosedur e-purchasing,

memanfaatkan sistem e-catalogue yang mempermudah proses pengadaan. Namun, berdasarkan survei awal yang dilakukan, ditemukan bahwa perencanaan kebutuhan obat sering kali tidak akurat dan tidak mencerminkan kebutuhan aktual, menyebabkan kekurangan obat atau penumpukan obat yang tidak terpakai (Pegawai Instalasi).

2. KAJIAN TEORITIS

Input

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah individu atau orang-orang yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kualifikasi SDM Instalasi Farmasi untuk pekerjaan kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Sedangkan kualifikasi untuk pekerjaan penunjang terdiri dari operator komputer/teknisi yang memahami kefarmasian, tenaga administrasi dan pekaryapembantu pelaksana yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain.

Proses

a. Perencanaan

obat adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan perbekalan farmasi sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien. Dalam perencanaan, pada tahap persiapan dibutuhkan pembentukan tim perencanaan, susunan tim, serta kegiatan tim perencanaan dalam usaha pemenuhan kebutuhan di Instalasi Farmasi.

b. Pengadaan

Pengadaan adalah usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional dengan menjamin ketersediaan, jumlahnya yang sesuai, dan waktunya yang tepat serta dengan harga yang terjangkau sesuai dengan standar mutu di Instalasi Farmasi.

c. Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan untuk menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian di Instalasi Farmasi.

d. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan

e. Penghapusan

Penghapusan adalah kegiatan untuk memusnahkan dan menarik sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ada di Instalasi Farmasi yang sudah tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Output

Tersedianya persediaan obat yang efektif dan efisien di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini manajemen logistik obat yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengendalian, pendistribusian, dan penghapusan obat dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk memenuhi persediaan obat untuk kebutuhan pasien.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, bertujuan untuk menganalisis manajemen logistik obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka tahun 2023, dengan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kolaka dari Oktober 2023 hingga selesai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Input

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peran penting dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang menentukan baik kualitas maupun jumlah pelayanan yang disediakan kepada Masyarakat (Hilmawati dkk., 2020). Kekurangan jumlah tenaga kerja, latar belakang pendidikan yang tidak memadai, serta tidak terpenuhinya persyaratan yang ada, dapat berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan dalam sebuah organisasi (Yunus dan Maharani, 2022).

Berdasarkan hasil yang diperoleh, sumber daya manusia yang ada pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten kolaka untuk proses manajemen logistik obat

sudah mencukupi dengan latar belakang pendidikan yang memadai dan sebelumnya telah melakukan pelatihan.

Untuk memastikan tenaga manajemen logistik obat yang bermutu, penting untuk melaksanakan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia (Taha dkk., 2021). Dengan adanya peningkatan kualitas tenaga pengelola obat, diharapkan akan tersedia obat-obatan berkualitas baik, yang terdistribusi secara merata, serta jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga penggunaan obat yang rasional untuk masyarakat dapat terwujud (Kemenkes RI, 2010).

2) Sumber Dana/Anggaran

Pada Permenkes RI No 74 tahun 2016 menyebutkan bahwa salah satu unsur masukan (input) yang mempengaruhi mutu pelayanan kefarmasian yaitu ketersediaan dana (Kemenkes RI, 2016). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sumber anggaran untuk proses manajemen logistik obat di dinas Kesehatan kabupaten kolaka berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum).

3) Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang memiliki dampak besar terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perencanaan berfungsi sebagai panduan atau arahan dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Sari dkk., 2024). Perencanaan obat adalah proses untuk menentukan kebutuhan obat baik dari segi jenis maupun jumlahnya secara efektif dan efisien, sehingga kebutuhan obat dapat terpenuhi dengan baik. Menentukan kebutuhan obat merupakan salah satu tugas utama dalam bidang kefarmasian yang harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi di tingkat Kabupaten/Kota (Yunus dan Maharani, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, perencanaan obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menggunakan metode konsumsi dan morbiditas serta pemilihan obat berdasarkan FORNAS (Formularium Nasional). Metode konsumsi adalah pendekatan perencanaan yang menggunakan analisis konsumsi logistik obat dari periode sebelumnya sebagai dasar perencanaan. Sedangkan metode epidemiologi adalah pendekatan perencanaan yang menggunakan analisis jumlah kasus penyakit dari periode sebelumnya sebagai dasar perencanaan (Rahmawatie dan Santosa, 2015). Dari kedua metode tersebut, metode yang paling sering digunakan oleh Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka adalah metode konsumsi.

4) Pengadaan

Pengadaan merupakan bagian dari proses untuk menyediakan obat dan perlengkapan kesehatan yang diperlukan di unit layanan kesehatan (Oktaviana, 2016). Tujuan dari pengadaan obat adalah untuk memastikan tersedianya obat dengan mutu yang terjamin, dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, serta dapat diperoleh tepat waktu (Yunus dan Maharani, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, proses pengadaan pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menggunakan sistem *e-catalog* dilakukan setiap 1 tahun sekali yang diterima secara bertahap dalam batas waktu yang ditentukan pada kontrak. Sistem *E-Catalogue* obat adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga obat dari berbagai penyedia barang/jasa tertentu (Kemenkes RI, 2013).

5) Penyimpanan

Penyimpanan adalah aktivitas pengaturan perbekalan farmasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, didukung oleh sistem informasi untuk memastikan ketersediaan perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan. Tujuan utama dari penyimpanan obat adalah untuk menjaga mutu obat dari kerusakan akibat penyimpanan yang tidak tepat, serta untuk mempermudah pencarian dan pengawasan obat-obatan. Barang yang sudah ada dalam persediaan harus dijaga agar tetap mempertahankan mutunya dan cukup jumlahnya, serta aman dalam penyimpanannya (Anggraini, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, penyimpanan obat pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka menggunakan metode FIFO/FEFO. Metode FIFO merupakan metode yang cara penyimpanannya yaitu obat terbaru yang masuk ditempatkan di belakang obat yang sudah ada sebelumnya sehingga obat yang pertama kali masuk (terlama) akan dikeluarkan dan digunakan terlebih dahulu. Sedangkan metode FEFO merupakan metode dengan meletakkan obat dengan tanggal kedaluwarsa (*Expired Date*) yang lebih lama diletakkan di belakang obat dengan tanggal kedaluwarsa yang lebih pendek, yang bertujuan untuk memastikan bahwa obat dengan masa kedaluwarsa yang lebih muda digunakan lebih awal, sehingga dapat mengurangi resiko obat kadaluwarsa (Sheina dkk., 2010). Penyimpanan obat disusun berdasarkan urutan alfabetis, bentuk sediaan, dan tahun pengadaan. Fasilitas sarana penyimpanan obat di instalasi tersebut belum cukup dikarenakan setiap pergantian tahun kebutuhan obat semakin meningkat.

6) Pendistribusian

Pendistribusian obat merupakan kegiatan untuk memastikan ketersediaan obat. Proses tersebut dimulai dengan pengeluaran dan pengiriman obat dari instalasi farmasi ke puskesmas berdasarkan surat pesanan yang diterima dari puskesmas, dengan tujuan untuk mencegah kekosongan stok obat (Trianingrum dan Raharjo, 2022). Selain itu, pendistribusian obat juga bertujuan untuk melakukan pengeluaran dan pengiriman obat dengan memperhatikan aspek mutu, jenis, dan jumlah secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan di unit pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari distribusi obat adalah agar pengiriman obat dilakukan secara merata dan teratur, sehingga obat dapat tersedia tepat waktu saat dibutuhkan. Dalam proses ini harus memastikan bahwa obat yang dikirimkan sesuai dengan standar mutu, jenis, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan program kesehatan yang berlaku (Yunus dan Maharani, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, proses distribusi obat pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dilakukan dengan memenuhi berdasarkan permintaan dari seluruh puskesmas di Kabupaten Kolaka. Selain itu, instalasi tersebut juga memiliki alat transportasi yang cukup memadai yaitu terdapat tiga mobil box sebagai kendaraan operasional proses distribusi obat.

7) Penghapusan

Penghapusan obat merupakan proses penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak dapat digunakan karena obat tersebut sudah kadaluwarsa, rusak, atau tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan (Yunus dan Maharani, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, proses penghapusan obat pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dilakukan berdasarkan jenis dan bentuk sediaan. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Sebelum pemusnahan dilakukan, tim akan menetapkan daftar sediaan obat yang akan dimusnahkan dengan diikuti oleh informasi berita acara, metode, dan tempat pemusnahan. Setelah proses pemusnahan obat, selanjutnya akan dibuat pelaporan. Hal ini sesuai dengan pustaka yaitu penghapusan obat-obatan yang kadaluwarsa atau rusak yang mengandung bahan-bahan narkotika atau psikotropika harus dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga farmasi lain yang memiliki izin praktek atau izin kerja. Proses ini dibuktikan dengan berita acara pemusnahan yang menggunakan formulir pemusnahan, dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas

kesehatan kabupaten/kota untuk dokumentasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kemenkes RI, 2014).

Output

Proses manajemen logistik obat memiliki dampak signifikan terhadap ketersediaan obat. Jika proses pengelolaan tidak efektif, maka ketersediaan obat yang dibutuhkan diperoleh dalam waktu yang lebih lama (Taha dkk. 2021). Pada hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa obat yang diperoleh pada puskesmas tersedia seluruhnya sesuai RKO yang diajukan, dan ketersediaan obat-obatan tersebut mencukupi kebutuhan selama satu tahun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen logistik obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Instalasi Farmasi sudah memadai, didukung dengan pelatihan yang telah diberikan, serta pengelolaan anggaran logistik obat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Perencanaan obat dilakukan dengan metode konsumsi yang mengacu pada penggunaan obat pada periode sebelumnya, yang memudahkan dalam memperkirakan kebutuhan obat. Pengadaan obat dilakukan melalui sistem *e-catalogue* sesuai dengan Permenkes Nomor 48 Tahun 2013, yang membuat proses pengadaan lebih efisien dan transparan. Sistem penyimpanan obat menerapkan metode FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) untuk menjaga kualitas obat serta meminimalisir risiko kedaluwarsa. Distribusi obat dilakukan sesuai dengan permintaan dari puskesmas dan didukung oleh sarana transportasi yang memadai sehingga pendistribusian berjalan lancar. Obat-obatan yang sudah tidak layak digunakan dihapuskan berdasarkan jenis sediaan sesuai dengan Permenkes Nomor 35 Tahun 2014. Secara keseluruhan, ketersediaan obat di puskesmas sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) telah mencukupi kebutuhan untuk satu tahun kontrak.

Oleh karena itu disarankan agar Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, terutama pada gudang farmasi, untuk memastikan penyimpanan obat yang lebih optimal serta menjaga mutu obat yang disimpan. Selain itu, tim perencanaan obat perlu lebih teliti dalam mengumpulkan dan memverifikasi data stok obat guna menghindari kelebihan atau kekurangan stok setelah pengadaan, sehingga pengelolaan obat dapat menjadi lebih efisien dan tepat guna.

DAFTAR REFERENSI

- Afqary, M., Ishfahani, F., & Rachman Mahieu, M. T. (2018). Jurnal Farmamedika Vol. 3, No. 1 Juni 2018. *Jurnal Farmamedika*, 3(1), 27–33.
- Anggraini, D., & Merlina, S. (2020). Analisis sistem penyimpanan obat di instalasi farmasi dinas kesehatan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018. *Pharmacy: Jurnal Farmasi Indonesia*, 17(1), 62–70.
- Asyifa, G. F., Priatna, M., & Setiawan, F. (2020). Analisis pengelolaan manajemen logistik pada instalasi farmasi RSUD Ciamis tahun 2019. *Journal of Pharmacopolium*, 1(1), 1–9.
- Bangun, W. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Erlangga.
- Barthos, B. (2012). *Manajemen sumber daya manusia (suatu pendekatan makro)*. Bumi Aksara.
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.